

**IMPLEMENTASI PEGADAIAN KEBUN KARET DI BANGUN SETIA
JORONG KUAMANG KENAGARIAN PANTI KECAMATAN PANTI
PASAMAN TIMUR SUMATERA BARAT
MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)**



DI SUSUN OLEH :

KASWANDI
NIM: 10725000073

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1432 H/2011 M**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **Implementasi Pegadaian Kebun Karet Di Bangun Setia Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur Sumatera Barat Menurut Ekonomi Islam.**

Penelitian ini bersifat penelitian (*Field Research*) dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang pelaksanaan Pegadaian yang ada di Bangun Setia Jorong Kuamang antar warga bukan ke perum pegadaiaan. Berlokasi di Jalan Bangun Setia Kampung Bangun Setia Jorong Kuamang Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Timur Sumatera Barat yang mayoritas bekerja sebagai petani kebun karet. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pegadaian Kebun Karet di Bangun Setia Jorong Kuamang, Apa Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Pegadaian Kebun Karet Itu, dan Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengambilan Hasil Atau Manfaat Barang Jaminan Kebun Karet.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegadai dan pihak yang menerima pegadaian dari tahun 2008-2011. M yang berjumlah 35 orang, yang terdiri dari pegadai 19 orang dan yang menerima gadai 16 orang sedangkan sebagai sampel dari pegadai sebanyak 50 % atau 10 orang, dan dari si penerima gadai 50 % atau 8 orang karena keterbatasan waktu dan dana dengan menggunakan metode *Random Sampling*. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan angket, di tambah dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

Data penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden (pegadai dan penerima gadai), dengan cara menjalankan angket dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan ini, dan penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, deduktif dan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pegadaian Kebun Karet di Bangun Setia Jorong Kuamang, Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Pegadaian Kebun Karet, dan Mengetahui Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengambilan Hasil atau manfaat Barang Jaminan Kebun Karet.

Dari penelitian ini dihasilkan beberapa temuan bahwa pegadaian yang ada di Bangun Setia yang dominan di jadikan sebagai agunan jaminan adalah kebun karet. Jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan atau di ambil hasilnya oleh si penerima gadai selama hutang pegadai belum dilunasi dengan jangka waktu yang tidak dibatasi, dengan implementasi yang sedemikian yang dibuat oleh para penerima gadai masyarakat masih tetap melakukan pegadaian walaupun mereka merasa dirugikan.

Akibat yang ditimbulkan pegadaian kebun karet dengan sesama warga bukan ke perum pegadaian bila ditinjau di segi positifnya antara lain: prosesnya yang cepat, persyaratannya mudah, dan tidak ada limit waktu atau pakai jatuh tempo yang mengakibatkan bertambahnya hutang. Sedangkan di segi negatif atau resikonya adalah: menghilangkan matapencarian si pegadai, kurangnya perawatan terhadap jaminan gadai kebun karet tersebut sehingga membuat karet tidak lagi produktif, dan menguntungkan sebelah pihak (penerima gadai).

Pandangan Ekonomi Islam terhadap pengambilan hasil atau manfaat barang jaminan kebun Karet oleh si penerima gadai (*murtahin*) sebahagian ulama membolehkan, Namun, harus ada izin dari (*rahin*), disyaratkan ketika akad, dan ditentukan waktunya apabila tidak ditentukan maka menjadi batal. Dan menurut jumhur *fuqaha* berpendapat penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. dan dari hasil penelitian penulis dilapangan jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai tidak ada pakai limit waktu, dan bahkan dalam pengambilan pemanfaatan atau hasil kebun karet tidak sesuai dengan seharusnya seperti dikala hari hujan masih mereka manfaatkan padahal itu sangat berdampak negatif (tidak produktif) terhadap kebun tersebut dengan demikian merugikan sepihak dalam hal ini pandangan ekonomi Islam tidak boleh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BANGUN SETIA JORONG KUAMANG KENAGARIAN PANTI KECAMATAN PANTI PASAMAN TIMUR SUMATERA BARAT	
A. Letak Geografis dan monografi.....	15
B. Profil	17
C. Jumlah Penduduk.....	19
D. Keadaan Mata Pencaharian	21
E. Pendidikan dan Sosial Budaya	22
1. Pendidikan	22
2. Agama	24
3. Adat Istiadat.....	26
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PEGADAIAN	
A. Pengertian Pegadaian.....	28
B. Dasar Hukum Gadai	30

C. Hukum Gadai.....	36
D. Rukun dan Syarat Gadai.....	37
E. Barang Jaminan	42
F. Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah dan Konvensional.....	44
G. Pengambilan Manfaat Barang Gadai.....	45

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pegadaian Kebun Karet di Bangun Setia Jorong Kuamang.....	53
B. Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Pegadaian Kebun Karet Itu	66
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengambilan Manfaat atau Hasil Barang Jaminan Kebun Karet	71

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mewajibkan berusaha untuk mendapat rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup. Islam juga mengajarkan bahwa Allah maha pemurah dan rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah memberi rezeki pada siapa saja yang bekerja keras. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, pengelolaan makanan dan minuman, dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan; atau dibidang jasa, seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya¹.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian mau tidak mau mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang di anggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting, terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Ketika kebutuhan dana jumlah besar, maka dalam jangka waktu pendek sulit untuk dipenuhi, bagi yang memiliki barang-barang berharga

¹ Bambang R Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Paramadhina Press, 2003), Cet. ke-1, h. 118.

kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga jumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi². Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Untuk mengatasi kesulitan di atas di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya kepada lembaga tertentu. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut, disebut dengan nama usaha gadai³. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin.

Pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum Perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan⁴.

Gadai (*al-rahn*) menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan, menurut istilah, *rahn* berarti menjadikan sesuatu benda bernilai

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-6, h. 245.

³ *Ibid*, h. 246.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-1, h. 2.

menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima⁵.

Dalam kehidupan masyarakat transaksi pegadaian sudah biasa mereka lakukan, hutang dengan adanya jaminan barang⁶. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- 2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- 3) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Sebagai landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah Swt. Sebagai berikut:

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”⁷.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Qawaid: Daar al-Bayan, 1971), Juz 12, Cet. ke-1, h. 177.

⁶ Choiratunnisa, *Bisnis Halal Bisnis Haram*, (Penerbit: Jombang Lintas Media, 2007), Cet. ke-1, h. 116.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya-Edisi Tajwid*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), Cet. ke-1, h. 49.

Dan adapun hadits sebagai landasan dibolehnya pegadaian dengan jaminan (*borg*) adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diirwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas r.a. ia berkata:

عن انس قال : رهن النبي صلى الله عليه وسلم . درعاً له بالمدينة عند يهودى .
واخذ منه شعيراً لاهله . (البخارى)

Artinya :“Dari Anas, ia berkata, Nabi saw. Pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya”⁸.

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat dan hadits di atas untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) menyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya.

Barang gadai yang berkedudukan sebagai tanggungan itu, selama ada di tangan pemegang barang gadai hanya merupakan amanat, pemiliknya masih tetap pada orang yang menyerahkan barang gadai, meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu⁹.

Pemegang barang gadai tidak dibenarkan menggunakan barang gadai kecuali dengan izin orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang),

⁸ Abi Hasan Sanadi, *Shahih Bukhari*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), Jilid-2, Cet. ke-1, h. 10.

⁹ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. ke-1, h. 78.

dimaksud untuk menjaga jangan sampai pihak orang yang menyerahkan barang gadai dirugikan, sebab sebagai pemilik, orang yang menyerahkan barang gadailah yang berhak menikmati hasil-hasil tambahan yang terjadi pada barang gadai selama ada di tangan pemegang barang gadai. Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “Apabila si *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*¹⁰.

Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum Islam datang, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka hak kepemilikan barang gadai beralih kepada pemegang gadai. Praktek semacam inilah yang kemudian dibatalkan oleh Islam¹¹. Ajaran agama Islam yang bersumber pada Wahyu Ilahi dan sunnaturnasul mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkann kehidupan yang baik didunia yang sekaligus

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), Ed.1, Cet. ke-2, h. 110.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), Cet. ke-1, h. 97.

memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat ini lah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan hidup lahir dan batin¹².

Manusia dibekali dengan norma, aturan dan nilai baik yang berasal dari Tuhan maupun hasil pemikiran manusia yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan (*term of reference*) untuk bertindak dan memilih perilaku yang baik atau yang buruk, benar atau salah, diperbolehkan atau dilarang, dan sebagainya¹³.

Melihat dari uraian yang telah dikemukakan di atas kemudian memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di Bangun Setia Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur Sumatera Barat. Dalam wawancara dengan salah seorang warga Bangun Setia Jorong Kuamang mengatakan. Pelaksanaan pegadaian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bangun Setia Jorong Kuamang seperti: menggadaikan tanah sawah kepada yang mempunyai dana, dengan cara uang dipinjamkan kepada *rahin* oleh si *murtahin* dengan jaminan tanah sawah, seperti yang dialami oleh Ijur yang megadaikan tanah sawahnya kepada Ineh, tanah sawah yang digadaikan tersebut digarap oleh si penerima gadai dan hasilnya untuk dia semua selama hutang tersebut belum lunas¹⁴, Begitu juga dengan pegadaian

¹² Wirdyaningsih, et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), Cet. ke-2, h. 4.

¹³ Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional Dalam Terbitan (KDT), 2008), Cet. ke-1, h. 45.

¹⁴ Ijur, (Rahin, masyarakat Bangun Setia Jorong Kuamang), *wawancara*, Bangun Setia, Sabtu, 18 Desember 2010.

kebun karet, implementasi yang diterapkan oleh penerima gadai dengan cara hasil kebun karet diambil sepenuhnya selama hutang belum dibayar¹⁵.

Dalam wawancara dengan Ibu Baiti salah seorang masyarakat yang menggadaikan kebun karetnya kepada Sariman, karena untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting kebun karetlah yang dijadikan sebagai jaminan, kalau tidak ada berupa jaminan sangat sulit didapat pinjaman dari masyarakat sekitar untuk memperoleh uang, padahal uang yang beliau butuhkan hanya sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Salah satu akibat dari pegadian dengan jaminan kebun karet tersebut adalah si pegadai tidak mendapat sedikitpun hasil dari jaminan kebun karetnya sementara kebun itu dimanfaatkan oleh si penerima gadai selama hutang belum lunas bahkan kurangnya perawatan dari penerima gadai terhadap kebun karet seperti dikala hujan masih mereka memanfaatkan sementara itu memanfaatkan kebun karet dikala hujan berdampak negative (tidak produktif) terhadap kebun tersebut¹⁶.

Penerima gadai (*murtahin*) terhadap barang jaminan kebun karet tersebut bukan menjadikannya sebagai jaminan semata-mata melainkan karet diambil hasilnya, layaknya seperti milik sendiri atau seperti sudah dijual. Persoalan di sini adalah pengambilan hasil atau manfaat kebun karet yang digadaikan oleh si pegadai. Kalau ditinjau kembali dan dihitung-hitung

¹⁵ Mail, (Rahin, masyarakat Bangun Setia Jorong Kuamang), *wawancara*, Bangun Setia, Sabtu, 18 Desember 2010.

¹⁶ Baiti (Rahin, masyarakat Bangun Setia Jorong Kuamang), *wawancara*, Bangun Setia, Sabtu, 18 Desember 2010.

serta diperbandingkan hasil yang didapat dari karet tersebut selama digadaikan melebihi dari hutangnya. Dengan demikian bisa merugikan satu pihak.

Memperhatikan kasus dan implementasi pegadaian yang terjadi yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian secara ilmiah dengan judul :**“Implementasi Pegadaian Kebun Karet di Bangun Setia Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur Sumatera Barat Menurut Ekonomi Islam”**.

B. Batasan Masalah

Melihat permasalahan-permasalahan dalam pegadaian yang terjadi serta keterbatasan kemampuan, waktu dan dana maka dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi masalah yang diteliti adalah: **“Implementasi Pegadaian Kebun Karet di Bangun Setia Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur Sumatera Barat Menurut Ekonomi Islam”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan diatas, penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pegadaian Kebun Karet di Bangun Setia Jorong Kuamang ?
2. Apa Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Pegadaian Kebun Karet Itu ?
3. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengambilan Manfaat atau Hasil Barang Jaminan Kebun Karet ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang diteliti adalah :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Pegadaian Kebun Karet di Bangun Setia Jorong Kuamang.
- b. Untuk Mengetahui Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Pegadaian Kebun Karet Itu.
- c. Untuk Mengetahui Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengambilan Manfaat atau Hasil Barang Jaminan Kebun Karet

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis dan sebagai sumbangsih penulis dalam mengembangkan disiplin Ilmu guna pengembangan Ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai pedoman dan perbandingan serta dapat memperluas ruang lingkup khazanah intelektual dikalangan mahasiswa/mahasiswi, para pakar ekonomi, masyarakat dan umumnya tentang yang berkaitan dengannya.
- c. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh menyelesaikan studi pada prgram Srata Satu (S1) atau sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syri'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi adalah penerapan; pelaksanaan¹⁷.
2. Dupo adalah sepanjang merentangkan ujung jari kanan dan ujung jari kiri (lebih-kurang 1,5 M).
3. Gadai (*Ar-Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat kembali mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁸
4. *Ghashab* adalah mengambil milik orang lain dengan paksaan atau kekerasan (merampas)¹⁹.
5. *Rahin* adalah orang yang menggadaikan atau pihak si pegdai, *murtahin* adalah orang yang menerima atau pihak penerima gadai, *marhun* adalah obyek yang digadaikan atau barang jaminan, *marhun bih* adalah hutang.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dilapangan, adapun lokasi penelitian di Bangun Setia Jorong Kuamang Jl. Bangun Setia Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur

¹⁷ Dahlan. Y. Al-Barry dan Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah: Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003), Cet. ke-1, h. 306.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. ke-1, h. 128.

¹⁹ Tim Kashiko, *Kamus al--Munir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2000), Cet. ke-1, h. 397.

Sumatera Barat. Adapun alasan penulis mengambil penelitian di Bangun Setia Jorong Kuamang karena melihat perkembangan ekonomi dan untuk mengetahui bagaimana di terapkannya oleh masyarakat yang mempunyai ekonomi mapan terhadap masyarakat yang melakukan pegadaian dan sehingga diharapkan dapat memberikan data-data yang lebih valid tentang seperti apa Pemanfaatan Kebun Karet Sebagai Barang Gadai oleh Penerima Gadai di Bangun Setia Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur Sumatera Barat dari Tahun 2008-2011 Menurut Ekonomi Islam.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pegadai dan pihak yang menerima gadai. Sedangkan yang menjadi Objeknya adalah Implementasi Pegadaian Kebun Karet di Bangun Setia Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur Sumatera Barat Menurut Ekonomi Islam

3. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegadai dan pihak yang menerima pegadaian yang berada di Bangun Setia Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur Sumatera Barat. Berjumlah 35 orang, yang terdiri dari pegadai 19 orang dan yang menerima gadai 16 orang sedangkan sebagai sampel dari pegadai sebanyak 50 % atau 10 orang, dan dari si penerima gadai 50 % atau 8 orang karena keterbatasan waktu dan dana dengan menggunakan

metode *Random Sampling*. Yaitu, pengambilan sampel secara acak yang mana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer: data langsung diperoleh dari para pegadai dan pihak yang menerima pegadaian.
- b. Data Sekunder: data yang diperoleh dari referensi perpustakaan dan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu penulis langsung melakukan pengamatan dilapangan untuk mendapatkan informasi dan kejelasan yang nyata dari para pegadai dan pihak yang menerima pegadaian.

b. Wawancara

Bertanya langsung kepada narasumber proses keterangan tersebut langsung dengan para pegadai dan pihak yang menerima pegadaian.

c. Angket

Angket adalah alat untuk mengumpulkan data dalam bentuk daftar pertanyaan berupa kuisisioner. Kuisisioner ini langsung di lapangan atau kepada pegadai dan penerima gadai

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan yang bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis lakukan adalah data Deskriptif Kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif: yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis secara khusus
- b. Induktif: yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis secara umum.
- c. Deskriptif: yaitu mengungkap uraian atas fakta dan yang sebenarnya yang didapati dari narasumber atau tempat penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan pemahaman atau lebih ringkasnya penulisan ini ditulis dalam beberapa bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Yang terdiri dari: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Bangun Setia Jorong Kuamang Kenagarian Panti Pasaman Timur Sumatera Barat

Yang terdiri dari: Letak Geografis dan Monografis, Profil, Jumlah Penduduk, Keadaan Matapencaharian, Pendidikan Dan Sosial Budaya.

BAB III: Tinjauan Umum Tentang Pegadaian

Yang terdiri dari: Pengertian Pegadaian (*rahn*), Dasar Hukum Gadai, Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Gadai, Barang Jaminan, Persamaan dan Perbedaan Gadai Syari'ah dan Konvensional dan Pengambilan Hasil atau Manfaat Barang Gadai.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Yang terdiri dari: Implementasi Pegadaian Kebun Karet di Bangun Setia Jorong Kuamang, Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Pegadaian Kebun Karet Itu, Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengambilan Manfaat atau Hasil Barang Jaminan Kebun Karet.

BAB V: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANGUN SETIA JORONG KUAMANG NAGARI PANTI KECAMATAN PANTI PASAMAN TIMUR SUMATERA BARAT

A. Letak Geografis dan Monografi

Secara geografis Pasaman Timur dilintasi khatulistiwa dan berada pada 0°55' Lintang Utara sampai dengan 0°06' Lintang Selatan dan 99°45' Bujur Timur sampai dengan 100°21' Bujur Barat. Ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 3.947,63 Km². Kabupaten Pasaman Timur merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat¹.

Wilayah Kabupaten Pasaman Timur merupakan Kabupaten Paling Utara dari Propinsi Sumatera Barat dan berbatasan dengan yaitu :

Bagian Utara : Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara.

Bagian Timur : Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bagian Selatan : Kabupaten Agam.

Bagian Barat : Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Timur terdapat 12 Kecamatan yaitu :

1. Lubuk Sikaping
2. Bonjol
3. Simpang Alahan Mati

¹ BPS Sumatera Barat Tahun 2010

4. Tigo Nagari
5. Panti
6. Padang Gelugur
7. Duo Koto
8. Rao
9. Rao Utara
10. Rao Selatan
11. Mapat Tuggul
12. Mapat Tuggul Selatan

Dalam kecamatan Panti terdapat 2 (dua) Nagari Yaitu: Panti dan Padang Gelugur, adapun Nagari panti terdiri dari 7 Jorong yaitu :

1. Ampang Gadang.
2. Petok.
3. Lundar.
4. Murni.
5. Kuamang.
6. Bahagia.
7. Sentosa².

Jorong Kuamang terdiri dari 13 kampung yaitu :

1. Kubu.
2. Sumpu.
3. Labuhan Jurung.

² Profil Nagari Panti 2010

4. Pasir.
5. Koto Lintang.
6. Padang Langgang.
7. Katimahar.
8. Koto Dalam.
9. Kuamang.
10. Kampuang Tuo.
11. Bangun Setia.
12. Air Panjang.
13. Botan³.

B. Profil

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari (kampung) Bangun Setia Jorong Kuamang terdapat di Pasaman Timur Kecamatan Panti Nagari Panti, Nagari/Kampung yang strategis untuk mencapai jalan antar lintas Medan-Padang sebelah Utara jalan/simpang Tapus dan sebelah Selatan jalan/simpang Petok, Secara geografis berada pada 00,28 Lintang Utara sampai dengan 00,15 Lintang Selatan dan 99,55 Bujur Timur sampai dengan 100,11 Bujur Barat.

³ Kantor Jorong Kuamang 2010.

Bangun Setia disebelah Utara berbatas kampung Tuo didirikan pada tahun 1992, sebelah selatan kampung Air Panjang didirikan pada tahun 1953, sebelah Timur perkebunan karet, dan sebelah Barat persawahan warga. Bangun Setia Jorong Kuamang pada awalnya bernama Air Taram, nama Air Taram dilatar belakangi panggilan dari masyarakat Kuamang dan Air Panjang karena kampung tersebut ditumbuhi pohon bambu Taram.

Pada Tahun 1967 periode pertama kampung ini baru ditempati oleh bapak Atid (Alm), Barun (Alm) yang berasal dari Potomuan dan Mutar, waktu itu tanah atau lahan perumahan belum dapat pembagian dari Niniak Mamak dan Rajo Kuamang selaku orang yang memiliki kekuasaan atas daerah atau perkampungan yang ada disekitar Jorong Kuamang.⁴

Pada Tahun 1968 periode ke-dua bertambah beberapa keluarga lagi diantaranya, bapak Karya, Tinus (Alm), Manap (Alm), Kasim (Alm), Nuruman, Bahak, Malin Sutan, Badui (Alm), pada tahun ini dimulai lah pembagian tanah lahan perumahan untuk para pendatang oleh Datuak Malano Tuo-Kasim (Alm), Rajo Hitam (Alm) dan Imam Sudi, yang bertugas membagikan tanah kepada warga adalah bapak Tinus (Alm), setiap kepala keluarga mendapat panjang 30 *Dopo* dan lebar 10 *Dopo* , dan mengenai pembagian lahan persawahan tersebut baru dibagi-bagikan kepada warga pada tahun 1969.⁵

Adapun Jorong Kuamang dipimpin oleh Malid, Jaulan, Syamsu, Khairunnas dan sekarang Usman Bay, Bangun Setia didirikan pada Tahun

⁴ Karya, *wawancara*, Bangun Setia, Tgl. 24 September 2010.

⁵ Miah, *wawancara*, Bangun Setia, Tgl. 24 September 2010.

1973 oleh Pegulu Manap (Alm), baru terdaftar dicatatatan sipil nama Bangun Setia pada Tahun 1984 Pegulu dipimpin oleh Ba'ani (Alm), dan pada tahun 1985 diserahkan kembali pimpinan pegulu kampung kepada Manap (Alm).

Pada tahun 1978 di Bangun Setia Jorong Kuamang baru dimulai berkebun Karet dibukit Buntak oleh bapak Ba'ani, Karya dan Tinus dengan bersembunyi-bunyi dikarenakan menghindari tekanan menteri kehutanan yang bernama "Maroh" dengan alasan hutan WC (*Best Wesen*) atau tanah hutan lindung, bapak Karya tetap bertahan dalam berkebun walaupun sudah mendapat tekanan dan peringatan dari Niniak Mamak Kuamang, Jorong Malid dan Sulaiman selaku cendikiawan selalu mengasih motifasi dalam berusaha membuat kebun Karet katanya, berusaha saja terus untuk berkebun karet dan tidak akan ada yang dihukum dikarenakan berusaha, dengan motifasi tersebut mereka makin yakin untuk berkerja berkebun karet.

Pada tahun 1988 awalnya masyarakat Bangun Setia melakukan Pegadaian sesama masyarakat dengan jaminan kebun karet oleh bapak Ba'ani kepada Bincit, hal ini baru berjalan lebih kurang enam bulan jaminan kebun karet tadi pindah tangan, karena si pegadai tidak sanggup lagi membayarnya dikarenakan mengalami kerugian dalam berusaha.

C. Jumlah Penduduk

Aspek kependudukan pada Tahun 2010, Jumlah Penduduk Jorong Kuamang berjumlah 6.010 jiwa. Dan terus mengalami kenaikan yang teratur setiap tahunnya. Di Jorong kuamang terdapat sebanyak 13 (tiga belas) kampung, dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda pada setiap

kampung. Adapun jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2010 di Jorong Kuamang adalah kampung Katimahar dan jumlah penduduk yang terkecil kampung Tuo. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini :

Tabel : 1
Jumlah Penduduk Per Kampung
Jorong Kuamang 2010

No	Nama Kampung	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Kubu	215
2.	Sumpu	126
3.	Labuhan Jurung	183
4.	Pasir	104
5.	Koto Lintang	143
6.	Padang Langgang	396
7.	Katimahar	1.533
8.	Koto Dalam	356
9.	Kuamang	1.392
10.	Kampuang Tuo	45
11.	Bangun Setia	552
12.	Air Panjang	604
13.	Botan.	361
	Jumlah	6.010

Sumber data : Kantor Jorong Kuamang

Penduduk yang berdomosili di Bangun Setia Kejorongan Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur Sumatera Barat 129 Kepala Keluarga 552 jiwa yang terdiri dari laki-laki 259 jiwa dan perempuan 293 jiwa, berdasarkan usia, penduduk Bangun Setia terbanyak terdapat pada usia 21-50 tahun. Dengan jumlah 250 jiwa dan yang paling sedikit pada usia 0-5 tahun dengan jumlah 50 jiwa, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini :

Tabel : 2
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Bangun Setia Tahun 2010

N O	Jenis	Umur tahun				
		0->5	6-14	15-20	21-50	51-keatas
1.	Laki-laki	21	37	41	121	39
2.	Perempuan	29	52	55	129	28
Jumlah		50	89	96	250	67

Sumber data : Kantor Jorong Kuamang

D. Keadaan Matapencaharian

Penduduk Nagari Panti pada umumnya adalah petani disamping ada beberapa orang yang berprofesi sebagai pedagang, tukang, Guru dll. Adapun mata pencaharian ataupun jenis pekerjaan penduduk Bangun Setia Jorong Kuamang Kenagarian Panti dengan kondisi suasana perkampungan dan tanahnya yang gambut dan subur mata pencaharian masyarakat pun beraneka ragam, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel : 3
Mata Pencaharian Masyarakat Bangun Setia
Tahun 2010

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum Bekerja	329 Jiwa
2	Petani	153 Jiwa
3	Pedagang	27 Jiwa
5	Karyawan	4 Jiwa
6	Wiraswasta	17 Jiwa
7	Bangunan	3 Jiwa
8	DLL	19 Jiwa
Jumlah		552 Jiwa

Sumber data: Kantor Jorong Kuamang

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat Bangun Setia mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai, petani, pedagang, karyawan, wiraswasta, dan tukang. Tetapi antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, dan salah satunya pekerjaan yang banyak membantu perekonomian masyarakat di Bangun Setia adalah pertanian sawah dan perkebunan Karet.

E. Pendidikan Dan Sosial Budaya

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi suatu potensi sumber daya manusia yang ada pada suatu wilayah tersebut. Adanya sarana pendidikan yang baik dan memenuhi standar dapat memunculkan sumber daya manusia yang berpotensi, yang sangat berguna sebagai generasi penerus dalam pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu dalam suatu perencanaan harus memperimbangkan kebutuhan sarana pendidikan. Untuk Jorong Kuamang sarana pendidikan yang ada antara lain 3 unit TK (Taman Kanak-Kanak), 6 unit SDN (Sekolah Dasar Negeri), serta 1 Unit SMP (Sekolah Menengah Pertama), Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel dibawah ini :

Tabel : 4
Sarana Pendidikan Jorong Kuamang
Tahun 2010

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	3
2	Sekolah Dasar Negeri	6
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri	1
Jumlah		10

Sumber data: Kantor Jorong Kuamang

Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Bangun Setia terbanyak adalah dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu 199 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah untuk tingkat pendidikan Diploma dan S1/Sederajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bangun Setia Jorong Kuamang masih rendah dalam sumber daya manusia yang ada. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan tersebut, maka dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel : 5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Bangun Setia Tahun 2010

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	93 Jiwa
2	Tidak Tamat Sekolah	179 Jiwa
3	Tamat Sekolah Dasar	199 Jiwa
4	Tamat SLTP dan Sederajat	42 Jiwa
5	Tamat SLTA dan Sederajat	37 Jiwa
6	Tamat Diploma	1 Jiwa
7	Tamat Starata I	2 Jiwa
Jumlah		552 Jiwa

Sumber data: Kantor Jorong Kuamang

Jumlah penduduk Bangun Setia yang sedang menjalankan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 6
Jumlah Penduduk Yang Menjalani Pendidikan
Bangun Setia Tahun 2010

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	21 Jiwa
2	Sekolah Dasar	110 Jiwa
4.	SLTP dan Sederajat	27 Jiwa
5.	SLTA dan Sederajat	4 Jiwa
6.	Strata I	8 Jiwa
7.	Strata II	1 Jiwa
Jumlah		171 Jiwa

Sumber data: Kantor Jorong Kuamang

Dari data diatas dapat kita ketahui dibidang pendidikan terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2. Agama

Kenagarian Panti sangat menjaga hubungan baik antara warga sehingga tidak terjadi pertentangan umat beragama. Kesadaran untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang tertib aman dan tenteram dalam beragama, maka perlu sekali masyarakat mengembangkan sikap saling menghormati, tenggang rasa, toleransi dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa masyarakat Kenagarian Panti lebih banyak menganut agama Islam dibanding agama lainnya. Untuk mengetahui lebih jelas agama yang

dianut masyarakat Kenagarian Panti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel : 7
Agama Penduduk Kenagarian Panti Tahun 2010

No	Agama	Jumlah
1	Islam	26.239 Jiwa
2	Kristen	457 Jiwa
3	Budha	-
4	Katolik	-
5	Hindu	-
Jumlah		26.696 Jiwa

Sumber data: Kantor Kenagarian Panti

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 26.239 jiwa atau 98.29 % memeluk Islam. Kristen 457 Jiwa atau 1.71 %. Tiap agama mempunyai sarana peribadatan yang tersebar pada setiap Jorong yang ada di Nagari Panti Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel dibawah ini :

Tabel : 8
Sarana Peribadatan
Nagari Panti Tahun 2010

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	40
2	Mushallah	30
3	Gereja	2
Jumlah		72

Sumber : Profil Nagari Panti

Sarana peribadatan pada Nagari Panti terdiri dari Mesjid 40 unit, Mushalla 30 unit, dan Gereja 2 unit. Dan berdasarkan surve untuk kondisi dari masing-masing sarana peribadatan bervariasi ada yang dalam kondisi baik sementara dan ada yang dalam kondisi memprihatinkan.

Adapun warga Jorong Kuamang 100 % menganut agama Islam yang mempunyai sarana ibadah yang tersebar pada setiap kampung. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel dibawah ini

Tabel : 9
Sarana Rumah Ibadah Kejorongan Kuamang

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	15
2	Mushallah	5
3	Gereja	-
Jumlah		20

Sumber data: Kantor Jorong Kuamang

3. Adat Istiadat

Nagari Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur terdiri dari berbagai suku diantaranya Minang, Melayu, Batak, Mandailing, Jawa, Sunda dan suku lainnya. Walaupun terdapat keberagaman suku tersebut namun warga hidup dalam keadaan yang harmonis dan selaras, hal ini dikarenakan setiap individu menyadari akan posisinya masing-masing sebagai warga nagari yang bertanggung-jawab terhadap kehidupan bernagari.

Di Bangun Setia Kejorongan Kuamang terdapat suku Tapsel, Batak, dan Minang, diantara beberapa suku ini yang paling banyak suku minang, Selain itu, mereka sering mengkombinasikan adat istiadat yang dimiliki setiap suku dalam suatu acara tertentu, seperti dalam acara walimah (pesta pernikahan). Dalam acara tersebut ada satu acara yang berbeda dengan acara yang lainnya yaitu Pencat Silat yang berasal dari suku

Minang. Pencat Silat ini dilakukan dari generasi yang satu sampai ke generasi selanjutnya. Acara pencat Silat tidak saja dilakukan ketika Walimah (pesta pernikahan), tapi pada acara panjat pinang ketika lebaran dan hari-hari besar. Dan dalam acara walimah (pesta pernikahan) tersebut ada pula satu acara yang berbeda dari acara lainnya yaitu tari Tor-tor yang berasal dari suku Batak. Para pemuka adat setempat mengatakan tari Tor-tor tersebut adalah sebuah warisan dari nenek moyang terdahulu. Acara ini selalu terlaksana disebabkan masyarakat setempat sadar bahwa adat itu sesuatu yang harus dipelihara dan dilestarikan dengan baik.

Dalam acara lain dapat juga ditemukan beberapa acara adat seperti acara makan bersama antara niniak mamak, alim ulama, datuak dan masyarakat dirumah Gadang pada 1 Syawal setelah sholat I Dul Fitri, acara Khatam al-Qur'an dimesjid setelah beberapa hari di bulan Syawal, pesta khitanan, kandhuri, dan lain sebagainya⁶.

Dengan demikian adat istiadat yang ada di Bangun Setia Kejorongan Kuamang tetap terjaga dan terlestarikan sesuai dengan suku-suku yang ada.

⁶Amir, (Niniak Mamak Bangun Setia), Tentang Adat Istiadat, *wawancara*, Bangun Setia, Minggu 24 April 2011.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEGADAIAN

A. Pengertian Gadai (*rahn*)

a. Gadai Menurut Etimologi

Ar-rahnu menurut bahasa ialah menahan sesuatu barang karena suatu sebab tertentu¹. Kalimat *rahn* (gadai) itu juga menurut *lughat* artinya ‘tetap’. Ada yang mengatakan ‘menahan’². *Rahn* berarti الثبوت والدوام (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti الحبس واللتزم (pengekangan dan keharusan).³ kalimat *rahn* terdapat juga didalam firman Allah SWT QS. al-Muddatstsir ayat 38 sebagai berikut:

كل نفس بما كسبت رهينة.

Artinya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (al-Muddadtstir : 38)⁴.

¹ Ahmad Abd. Madjid, *Masa'il Fiqhiyah*, (Jawa Tengah: Garoeda Buana Indah, 1993), Cet. ke-4, h. 87.

² Abu Bakar Taqiyuddin Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shalih*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), Cet. ke-7, h. 584.

³ Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), Cet. ke-1, h. 159.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya-Edisi Tajwid*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), Cet. ke-1, h. 576.

b. Gadai Menurut Terminologi

Adapun gadai/*rahn* menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: *Ar-rahnu* menurut istilah perjanjian akad dengan jaminan suatu barang atau benda yang terjamin sebagai penebus utang ketika mendapat kesulitan untuk membayarnya⁵. Gadai Menurut Bank Indonesia (1999), adalah akad penyerahan barang atau harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang⁶. Gadai ialah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang⁷. Menjadikan harta sebagai pengkukuh atau penguat sebab adanya hutang⁸. Suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang⁹. *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat kembali mengambil seluruh atau sebagian piutangnya¹⁰

⁵ *Ibid.* h. 87.

⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet. ke-3, h. 28.

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), Cet. ke-10, h. 123.

⁸ Abu Bakar Taqiyuddin Bin Muhammad, *op.cit.*, h. 584.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. ke-27, h. 309.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. ke-1, h. 128.

B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syari'ah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad saw, ijma' para ulama, dan fatwa MUI. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

1. al-Qur'an

Sebagai landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah Swt. Berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَيْنَ بِبَعْضِ الْبَعْضِ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾

Artinya :“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”¹¹.

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) menyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu¹². Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seorang ketika dalam keadaan

¹¹ Departemen Agama *op.cit.*, h. 49.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), Cet. ke-1, h. 6.

musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahaan transaksi *rahn*.

2. Hadits

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai Syariah adalah hadits Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

- a. Hadis A'isyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل, ورهنه د رعا من حديد (روه مسلم)

Artinya :

”Dari ‘Aisyah telah meridhai Allah dari pada-Nya, bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu tertentu dan rasul menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut (sebagai agunan)”.(HR. Muslim)¹³.

- b. Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عن انس, قال: لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم د رعه عند يهودي بالمدينة فاعخذ لاهله منه شعيرا (رواه ابن ماجه)

¹³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Jilid. 2, Cet. ke-1, h. 459.

Artinya :“Dari Anas bin Malik ra ia berkata: Rasulullah saw pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya”. (HR. Ibnu Majah),¹⁴.

- c. Muhammad ibnu Ismail ibnu Abu Fudaik telah menceritakan kepada kami, dari ibnu Abu Dzi-b, dari ibnu Syihab, dari Sa'id ibnu Musayyab, bahwa Rasulullah SAW, Pernah bersabda:

لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

Artinya:

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya”. (H.R. Asy-Syafi'i)¹⁵.

3. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang mengadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad

¹⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid. 2, Cet. ke-1, h. 418.

¹⁵ Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), Juz 2, Cet. ke-1, h. 1343.

saw. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad saw kepada mereka.

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya di kemukakan sebagai berikut :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi¹⁶.

Disamping itu para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn*, landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Islami Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan

¹⁶ Zainuddin Ali, *op. cit.*, 8.

menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahn* (yang menyerahkan barang) di lunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya Administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman¹⁷.
5. Penjualan *marhun* :
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *rahn* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. ke-2. h. 390.

- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

b. Ketentuan Penutup :

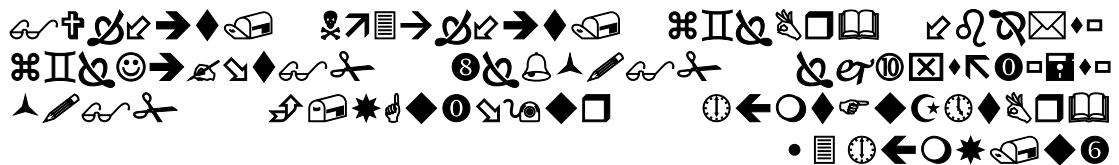
- 1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya¹⁸.

¹⁸ Nurul Huda dan Mohammad Heykal , *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana 2010), Ed. 1, Cet. Ke-1, h. 278-279.

C. Hukum Gadai (*rahn*)

Para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai¹⁹.

Firman Allah SWT: **فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ** pada ayat diatas *irsyad* (anjuran baik) saja kepada orang beriman sebab dalam lanjutan ayat tersebut dinyatakan:



Artinya : ” Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”²⁰.

Selain itu perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum hutang sendiri tidaklah wajib, begitu juga pengantinya, yaitu barang jaminan. Alasan hukum bolehnya *muamalah* dengan memberikan agunan atau jaminan itu adalah dengan memberikan agunan itu memberikan keringanan kepada pelaku *muamalah* dalam pergaulan hidup dan kepuasan hati baginya dalam bermuamalah²¹.

¹⁹ Syafei Rachmat, *op.cit.*, h. 161.

²⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, 1, h. 49.

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), Ed. 1, Cet. ke-1, h. 229.

D. Rukun dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut :

1. Rukun Gadai

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai meliputi orang yang mengadaikan (*ar-rahin*), barang yang digadaikan (*al-marhun*), orang yang menerima gadai (*al-murtahin*). Nilai barang mendorong adanya gadai dan sifat akad gadai²².

Dalam fikih empat mashab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

a. *Aqid* (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau menerima

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid-3, Cet. ke-3, h. 192.

gadai. Hal dimaksud didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai)²³.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:²⁴.

1. Telah dewasa;
2. Berakal;
3. Atas keinginan sendiri.

b. *Ma'qud' alaih* (Barang Yang Diakadkan)

Ma'qud alaih meliputi 2(dua) hal yaitu, (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*²⁵.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:²⁶.

1. Dapat diserahkan terimakan
2. Bermanfaat
3. Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
4. Jelas
5. Tidak bersatu dengan harta lain

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-1, h. 20.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), Cet. ke-1, h. 91.

²⁵ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 20

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h. 92

6. Dikuasai oleh *rahin*
7. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

2. Syarat-Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai yang dimaksud, terdiri atas:

a. *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat di perpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi²⁷.

b. *Pihak- Pihak Yang Berakad Cakap Menurut Hukum*

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baliqh*, berakal sehat, dan mampu, melakukan akad.

Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan

²⁷ Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 20

yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal; sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, melainkan cukup sudah berakal saja dan mendapat persetujuan dari walinya.

c. Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa :

1. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang;
2. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; dan
3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:²⁸.

1. Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan
2. Marhun bih memungkinkan dapat dibayar
3. Hak atas marhun bih harus jelas

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan syarat, yaitu:

1. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan

²⁸ Rachmat Syafei, *op.cit.*, 163.

2. Utang harus lazim pada waktu akad
3. Hutang harus jelas

d. *Marhun*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalaah:.

1. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam;
2. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan nilai utang;
3. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
4. Agunan itu milik sah debitur;
5. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya);
6. Agunan itu harus harta yang utuh; dan

7. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya²⁹.

E. Barang jaminan

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari perum pegadaian, perum pegadaian telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan.³⁰

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian sebagai berikut:

1. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain:
 - a. Emas
 - b. Perak
 - c. Intan
 - d. Berlian
 - e. Mutiara

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), Cet. ke-1, h. 21.

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-6, h. 250.

- f. Platina
 - g. Jam
2. Barang-barang berupa kendaraan seperti:
 - a. Mobil
 - b. Sepeda motor
 - c. Sepeda biasa
 3. Barang-barang elektronik antara lain:
 - a. Televisi
 - b. Radio
 - c. Radio tape
 - d. Video
 - e. Computer
 - f. Kulkas
 4. Mesin-mesin seperti:
 - a. Mesin jahit
 - b. Mesin kapal motor
 5. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti:
 - a. Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik
 - b. Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat

apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai pengantinya.

- c. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya³¹.

F. Persamaan dan Perbedaan Gadai Syari'ah dan Konvensional

Perbedaan dan persamaan gadai syari'ah dan konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut ini:³²

Tabel : 10
Perbedaan dan Persamaan Gadai Syari'ah dan Konvensional

Persamaan	Perbedaan
1. Hak gadai atas pinjaman uang.	a. <i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
2. Adanya agunan sebagai jaminan hutang	Sedangkan gadai menurut hukum Perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan	b. Dalam hukum Perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, <i>rahn</i> berlaku pada seluruh benda baik yang
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai	
5. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang	

³¹ Andri Soemitra, *op. cit.*, h. 398.

³² Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. ke-1, h. 87-

	bergerak maupun yang tidak bergerak c. Dalam <i>rahn</i> tidak ada istilah bunga d. Gadai menurut hukum Perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian, <i>rahn</i> menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
--	---

G. Pengambilan Manfaat Barang Gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh pegadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu; sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya³³.

Pendapat beberapa ulama fikih mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*.

1. Rahin Memanfaatkan Marhun

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (menahan barang gadai) oleh

³³ Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, h.124.

murtahin. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yaang telah digadaikan. Mengenai pemanfaatan *rahin* atas *marhun* dimaksud, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut.

Mayoritas ulama melarang dan atau tidak membolehkan jenis pemanfaatan dalam transaksi gadai. Lain halnya Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin pada *murtahin*³⁴. Ulama Syafi'iyah membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun*³⁵. bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).³⁶ Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan hutang yang ditanggungnya. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h. 93.

³⁵ Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 31.

³⁶ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1997), Ed. ke-3, h. 333.

الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويسرب النفقه

Artinya:

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susunya tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan"³⁷.

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat: *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin*.

Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi hutangnya. Pandangan Ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan (*mahbusah*).

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin* mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberi izin pada *rahin* untuk pemanfaatan barang gadai maka menurut mereka akad gadai batal karena tidak memenuhi kondisi penahanan terhadap barang gadai.

Selain itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*),

³⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *op. cit.*, h. 419.

mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika *rahn* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashab*)³⁸. Begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan tanpa seizin *rahn*. Alasannya hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut.

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة.

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, "Rasulullah saw. Bersabda, " Binatang ternak yang digadaikan, saat digadaikan boleh dinaiki oleh pemberi hutang, sesuai biaya yang dikeluarkan untuk mengurusnya. Dan ketika digadaikan, susunya juga boleh diambil oleh pemberi hutang, karena dengan biayanya pengurusan binatang tersebut. Orang yang menunggangi dan meminum susunya, harus membiayai pengurusannya". (HR. Al-Bukhari)³⁹.

2. Murtahin Memanfaatkan Marhun

Apabila *rahn* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan hutang *rahn*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan ulama disyaratkan oleh adanya *rahn* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Penyerahan *marhun*

³⁸ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 31-32.

³⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Jilid. 2, Cet. ke-1, h. 183.

merupakan salah satu syarat dari akad *rahn*, sehingga ketika seorang menggadaikan suatu barang, tetapi ia membatalkannya, sebab gadaian yang belum ada penerimaan merupakan akad yang jaiz (boleh diubah), oleh karena itu, ia boleh menarik kembali akad gadaian, sebagaimana khiyar dalam jual beli. Pada kondisi seperti hal dimaksud, barang gadai berada ditangan *murtahin* hanya berhak menahan, tetapi bukan memilikinya. Karena itu, bagaimana status pemanfaatan yang harus dilakukan terhadap barang gadai ? pada permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal *murtahin* yang memanfaatkan harta gadai. Perbedaan yang dimaksud, dikemukakan sebagai berikut:

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan, baik mengendarai, mengambil susu binatang ternak dan lain sebagainya, kecuali atas izin *rahin*. Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*, status hukumnya seperti orang *ghashab*⁴⁰. Namun, bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan harta gadai maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi 2 (dua) pendapat, yaitu:

1. Membolehkan secara mutlak, dan

⁴⁰ Tim Kashiko, *Kamus al-Munir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2000), Cet. ke-1, h. 397.

2. Mensyaratkan sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*. Namun, hal itu dapat menjerumuskan pada *riba*⁴¹.

Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan *marhun* (borg), hukumnya haram sebab termasuk *riba*⁴². sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw.

وعن علي رضي الله عنه : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل قرض جر منفعة فهو ربا. (رواه الحارث بن ابي اسامة)

Artinya:

“Dari Ali ra, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk *riba*” (Riwayat Harits bin Usamah)⁴³.

Ulama malikiyah berpendapat mengenai status hukum pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (a) dalam hutang yang bersifat *qard*, (b) dalam hutang piutang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awwadah* (pertukaran). Dalam bentuk pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* walaupun hal itu merupakan *tabarru'* dari *rahin* kepada *murtahin*.

⁴¹ Zainuddain Ali, *op. cit.*, h. 35.

⁴² Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 174.

⁴³ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid-4, Cet. ke-1, h. 495.

Ulama Syafi'iyah secara umum berpendapat seperti pendapat Ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan. Karena itu, jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahn* yang didasarkan pada akad *qord* maka syarat tersebut menjadi batal, demikian pula akad pegadaainya, karena itu dapat membahayakan kepentingan *rahin*.

Bagi ulama Hanabilah pemanfaatan atas barang gadai harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Kalau *marhun* berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain-lain, maka *murtahin* dilarang memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*. Namun, bila ada izin dari *rahin*, dalam pengertian gadai itu merupakan harga barang jualan, atau sewa rumah maka hal itu diperbolehkan oleh ulama Hanabilah. Lain halnya dalam perjanjian gadai hewan ternak atau tunggangan, maka ulama Hanabilah *murtahin* boleh mengambil manfaatnya yang seimbang atau yang sepadan dengan nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara *marhun*, walaupun *rahin* tidak mengizinkannya. Pendapat mereka dalam hal dimaksud, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw:

الظهر يركب بنفقته

Artinya:

"Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat diambil manfaatnya apabila digadaikan". (H.R. Ibnu Majah)⁴⁴.

Hadis diatas menjelaskan bahwa bagi yang memelihara barang gadai, maka ia boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sesuai dengan biaya yang ia keluarkan⁴⁵. Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah *riba*⁴⁶.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*⁴⁷. Rasulullah saw. Bersabda:

كل قرض جر منفعة فهو ربا. (رواه الحارث بن ابي اسامة)

Artinya:

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *op. cit.*, h. 419.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 35-36.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h. 94.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), Ed. 1, Cet. ke-2, h. 108.

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”

(Riwayat Harits bin Usamah)⁴⁸.

⁴⁸ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid-4, Cet. ke-1, h. 495.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pegadaian Kebun Karet di Bangun Setia Jorong Kuamang

Masyarakat Bangun Setia Jorong Kuamang lebih dominan bekerja sebagai petani dan berkebun, adapun pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari, seperti bertani sawah, berkolam ikan, berkebun jagung, dan berkebun karet¹. Berkebun karet merupakan pekerjaan yang paling banyak dilakukan masyarakat Bangun Setia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik dengan bekerja dikebun sendiri maupun bekerja di kebun karet orang lain². Dari penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan lainnya. yang menjadi masalah ketika ada kebutuhan yang sangat penting seperti ada anggota keluarga yang sakit, pesta pernikahan, dan biaya pendidikan sementara uang yang dimiliki tidak mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan diatas disamping tidak adanya dapat pinjaman dari berbagai instansi dan pihak tertentu, maka kebun karetlah yang dijadikan sebagai barang gadaian atau jaminan hutang³.

Akad Pegadaian yang biasa di Bangun Setia Jorong Kuamang adalah melakukan akad pegadaian dengan cara menggadaikan kebun karet

¹ Imeh, (Murtahin), *wawancara*, Bangun Setia, Minggu, 24 April 2011.

² Tion, (Murtahin), *wawancara*, Bangun Setia, Senin, 25 April 2011.

³ Baiti, (Rahin), *wawancara*, Bangun Setia, Minggu, 24 April 2011.

kepada penerima gadai (*murtahin*) bukan ke perum pegadaian, adapun jenis-jenis akad atau perjanjiannya ada berupa kesepakatan dua belah pihak saja, dan ada pakai surat perjanjian.

Yang terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian adalah akad atau perjanjian. Akad menjadi bagian penentu setiap transaksi ekonomi, yang harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena akad lah transaksi itu sah atau tidak sah. Dan bentuk perjanjian atau akad gadai yang diimplementasikan di Bangun Setia oleh para penerima gadai dengan si pegadai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 11
Tanggapan Responden Bentuk Perjanjian Pegadaian

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Bentuk Tulisan	2	25 %
2	Bentuk Lisan	6	75 %
3	Bentuk Pakai Saksi	-	-
Jumlah		8	100 %

Sumber data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 2 penerima gadai (25 %) yang menyatakan bentuk pegadaian dengan tulisan dan 6 penerima gadai (75 %) yang menyatakan bentuk lisan.

Pegadaian yang dibuat antara *murtahin* dan *rahin* tidak pakai limit waktu yang ditentukan, sebagaimana layaknya perum Pegadaian atau lembaga keuangan yang menyediakan jasa pegadaian. Hal ini diungkapkan oleh salah seeorang pegadai (*rahin*) bapak Wahir mengatakan : kami melakukan pegadaian kepada penerima gadai di Bangun Setia Jorong

Kuamang dikarenakan membutuhkan dana cepat maka kami menggadaikan kebun karet sebagai jaminan dengan tidak menggunakan jangka waktu untuk melunasinya, yang penting disaat itu kami dapat uang dan barang jaminan kami tersebut selama hutang kami selaku pengadai belum lunas, penerima gadai mengambil hasil kebun karet yang kami gadaikan⁴. Dari beberapa orang populasi yang penulis jadikan sebagai sampel melihat implementasi yang di buat oleh para penerima gadai sedemikian ternyata di antara pegadai tidak saja melakukan hal itu cuma sekali saja melainkan sebelum-belumnya sudah pernah. Yang pernah sebelumnya melakukan pegadaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : 12
Tanggapan Responden Sebelumnya Pernah Melakukan Pegadaian

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Pernah	6	60 %
2	Ragu-Ragu	-	-
3	Tidak Pernah	4	40 %
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 6 pegadai (60 %) yang menyatakan sebelumnya pernah melakukan pegadaian, dan 4 pegadai (40 %) yang menyatakan tidak pernah sebelumnya melakukan pegadaian.

Pegadaian yang dilakukan oleh para pegadai di Bangun Setia tidak melalui perum pegadaian akan tetapi melalui sesama warga penerima gadai yang ada di Bangun Setia Jorong Kuamang. Besar pinjaman yang diberikan

⁴ Wahir (Rahin), *wawancara*, Bangun Setia, Jum'at, 29 April 2011

pihak penerima gadai berpariasai artinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau maksimalnya Rp 10.000.000, seperti kata Gusrianto untuk keperluan biaya pendidikan anak dan biaya ongkos pergi merantau hanya membutuhkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- sangat sulit mendapatkan pinjaman, sehingga kebun karetlah dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang tersebut⁵. Sedangkan biaya-biaya yang dibutuhkan para pegadai ketika ada keperluan yang sangat penting sehingga harus menggadaikan kebun karet dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 13
Tanggapan Responden Biaya Yang Dibutuhkan Sehingga
Harus Menggadaikan Kebun Karet

No	Jawaban	Angka	Persen
1.	Rp. 0 < 2 Juta	8	80 %
2.	Rp. < 5 Juta	-	-
3.	Rp. 6 s/d 10 Juta	2	20 %
Jumlah		10	100 %

Sumber data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 8 pegadai (80 %) yang menyatakan kurang dari Rp.2.000.000,- juta yang dibutuhkan sehingga harus menggadaikan kebun karetnya, dan 2 pegadai (20 %) yang menyatakan antara Rp.6 s/d.10 juta yang dibutuhkan sehingga harus menggadaikan kebun karetnya.

Kebut karet merupakan asset setiap keluarga yang ada di Bangun Setia dalam menghidupi diri dan keluarganya, apabila mereka terdesak untuk memenuhi kebutuhan lain mereka dengan sangat terpaksa harus

⁵ Gusrianto, (Rahin), wawancara, Bangun Setia, Senin 25 April 2011.

menggadaikan kebunnya kepada penerima gadai. Dengan waktu yang tidak pasti, kadang kala ada yang sampai 1 tahun, itupun hanya pinjaman Rp 2 jutaan, ada juga pegadai pernah sampai 2 tahunan dengan pinjaman Rp. 3 jutaan dikarenakan beliau tidak sanggup membayar hutang tersebut. Hal ini pernah diungkapkan Afriyon, beliau mengatakan bahwa: saya menggadaikan kebun karet kepada penerima gadai lantaran kekurangan biaya untuk keperluan biaya pendidikan anak dan kebutuhan keluarga, ketika itu saya minjam kepada penerima gadai sebesar Rp. 2.000.000.- dengan jaminan kebun karet⁶, lama jaminan gadai di pegang oleh penerima gadai selama hutang gadai belum dilunasi. Dari beberapa pegadai menyatakan lama menggadaikan kebun karet dari populasi yang penulis jadi sebagai sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 14
Tanggapan Responden Mengenai Lama Menggadaikan kebun karet

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Dibawah 1 (satu) Bulan	-	-
2	Dibawah 6 (enam) bulan	2	20 %
3	Dibawah 18 (delapan belas) bulan	8	80 %
Jumlah		10	100%

Sumber data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 2 pegadai (20 %) yang menyatakan lama menggadaikan kebun karetnya dibawah 6 (enam) bulan, dan 8 pegadai (80 %) yang menyatakan menggadaikan kebun karetnya dibawah 18 (delapan belas) bulan.

⁶ Afriyon, (Rahin), *wawancara*, Bangun Setia, Selasa, 3 Mei 2011.

Ketika kebutuhan dana jumlah besar, dalam jangka waktu pendek sulit untuk dipenuhi, bagi yang mempunyai barang-barang berharga kesulitan dana tersebut dapat dipenuhi dengan menjual barang-barang berharganya, tapi risikonya barang yang sudah dijual akan hilang dan sulit untuk kembalinya, untuk mengatasi hal demikian masyarakat Bangun Setia melakukan pegadaian sesama warga bukan keperum pegadaian, dari hasil wawancara penulis dilapangan dengan warga yang dijadikan sebagai sampel sebab-sebab dan kenapa mereka melakukan pegadaian sesama warga di karena biaya pendidikan anak, desakan ekonomi, biaya merantau kenegeri jiran, dan biaya perawatan keluarga yang sakit, biar lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : 15
Hasil Wawancara Alasan Pegadai Melakukan Pegadaian Sesama Warga

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Desakan Ekonomi	2	20 %-
2	Biaya Perawatan Keluarga Sakit	4	40 %
3	Biaya Pendidikan Anak	3	30 %
4	Biaya Merantau ke Negeri Jiran	1	10 %
Jumlah		10	100 %

Sumber data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 2 pegadai (20 %) yang menyatakan alasanya desakan ekonomi, 4 pegadai (40 %) yang menyatakan biaya perawatan keluarga yang sakit, 3 pegadai (30 %) karena

biaya pendidikan anak, dan 1 pegadai (10 %) biaya ongkos merantau kenegeri jiran.

Fungsi atau kegunaan dari barang jaminan antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang di pinjamkan. Dan dari beberapa penerima gadai di Bangun Setia yang penulis jadikan sebagai sampel lebih dominan menyatakan bahwa mereka kurang setuju barang jaminan hanya sebagai jaminan atau titipan saja. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah seorang penerima gadai, mengatakan: saya tidak setuju kalau barang jaminan hanya sekedar titipan saja karena uang saya dipakai sama si pegadai sementara uang itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya⁷. Pernyataan dari beberapa penerima gadai lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : 16
Tanggapan Responden Yang Menyatakan Setuju Kalau Barang Gadai Itu Hanya Titipan Atau Jaminan Saja

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Setuju	1	12.5 %
2	Kurang setuju	6	75 %
3	Tidak setuju	1	12.5 %
Jumlah		8	100%

Sumber data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 1 penerima gadai (12.5 %) yang menyatakan setuju dan 6 pegadai (75 %) yang menyatakan kurang setuju (12.5 %) tidak setuju.

⁷ Sariman, (Murtahin), *wawancara*, Bangun Setia, Kamis, 28 April 2011.

Manfaat atau yang diharapkan dari barang jaminan ada beberapa hal yaitu: menjaga kemungkinan si pegadai lalai atau main-main terhadap hutangnya, memberikan keamanan bagi si penerima gadai, dan membantu saudara kita yang kesulitan dana. Dari hasil survei penulis dilapangan para penerima gadai lebih dominan menyatakan mencari keuntungan. Seperti kata bapak Afrizal⁸. Uang saya dipakai oleh pegadai tentu saya menginginkan keuntungan dengan cara mengambil manfaat dari hasil jaminan kebun karet tersebut, lebih jelasnya terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 17
Tanggapan Responden Yang Diharapkan dari Barang Jaminan

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Keuntungan	6	75 %
2	Sebagai Jaminan Saja	2	25 %
3	Tidak Ada	-	-
Jumlah		8	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 6 penerima gadai (75 %) yang menyatakan mengharapkan keuntungan dari barang jaminan, dan 2 penerima gadai (25 %) yang menyatakan sebagai jaminan saja.

Barang jaminan yang ada sama si penerima gadai merupakan titipan, lain halnya dengan para penerima gadai di Bangun Setia, seperti kata salah seorang pegadai: mereka bukan menjadikan sebagai jaminan saja melainkan mereka ambil hasil dari barang jaminan tersebut sepenuhnya.⁹ Para pegadai yang penulis jadikan sebagai sampel dari populasi menyatakan hal yang

⁸ Afrizal, (Murtahin), *wawancara*, Bangun Setia, Jum'at, 29 April 2011.

⁹ Kamin, (Rahin), *wawancara*, Bangun Setia, Selasa, 26 April 2011.

sama mengenai pengambilan barang jaminan. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 18
Tanggapan Responden Penghasilan Kebun Karet Yang Digadaikan
Diambil Sepenuhnya Oleh Si Penerima Gadai

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Ya, di ambil sepenuhnya	10	100 %
2	Sebagian	-	-
3	Tidak sama sekali	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 10 pegadai (100 %) yang menyatakan penghasilan kebun karet yang digadaikan sebagai barang jaminan diambil sepenuhnya oleh si penerima gadai.

Pengambilan manfaat atau hasil dari jaminan barang gadai yang tidak membutuhkan biaya pemeliharaan para penerima gadai di Bangun Setia dalam menanggapi berbagai tanggapan ada yang mengatakan boleh, ragu-ragu dan ada pula menyatakan tidak boleh, sebagaimana kata salah seorang penerima gadai tidak boleh diambil karena merugikan si pegadai¹⁰. biar lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

¹⁰ Teral, (Murtahin), *wawancara*, Bangun Setia, Senin, 25 April 2011.

Tabel : 19
Tanggapan Responden Mengambil Manfaat Barang Gadai
Yang Tidak Membutuhkan Biaya Pemeliharaan

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Boleh	2	25 %
2	Ragu-ragu	3	37.5 %
3	Tidak boleh	3	37.5 %
Jumlah		8	100 %

Sumber data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 2 penerima gadai (25 %) yang menyatakan boleh penerima gadai mengambil manfaat barang gadai yang tidak membutuhkan biaya pemeliharaan, 3 penerima gadai (37.5 %) yang menyatakan ragu-ragu, dan 3 penerima gadai (37.5 %) yang menyatakan tidak boleh.

Hasil kebun karet yang dimanfaatkan oleh penerima gadai diluar dari pinjaman, Helmy mengatakan: hasil karet yang saya gadaikan kepada penerima gadai 5 Kg/hari kebawah¹¹. Dan pendapat yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel : 20
Tanggapan Responden Penghasilan Kebun Karet Yang Digadaikan
Dapat Dilihat Dari Tabel Dibawah

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	5 Kg/hari kebawah	8	80 %
2	10 Kg/hari kebawah	2	20 %
3	15 Kg/hari kebawah	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber data: Data Olahan

¹¹ Helmy, (Rahin), *wawancara*, Bangun Setia, Minggu 24 April 2011.

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 8 pegadai (80 %) yang menyatakan 5 Kg/hari penghasilan kebun karet yang digadaikan sebagai barang jaminan dan 2 pegadai (20 %) yang menyatakan 10 Kg/hari penghasilan kebun karet yang digadaikan sebagai barang jaminan.

Dengan penghasilan kebun karet diambil oleh para penerima gadai, bapak Afriyon mengatakan: saya merasa dirugikan oleh para penerima gadai terhadap jaminan karet yang saya gadaikan, hasilnya tidak pernah sedikitpun dikasih bahkan ada sebagian mereka itu melakukan pekerjaan dengan tidak semestinya, meskipun kedua belah pihak telah membuat sebuah persetujuan namun, pada prakteknya persetujuan itu tidak dilaksanakan. Demikian juga ibu Isam berkata: "beliau pernah melakukan hal tersebut, namun persetujuan yang pada awalnya mereka buat tidak dilaksanakan, dalam arti kata mereka membuat sebuah persetujuan itu hanya sebatas formalitas saja, bahkan pernah sipenerima gadai berjanji mau memberi saya hasil kebun karet yang saya gadaikan itu di waktu Momangkiak (setelah pemanfaatannya) tapi tidak pernah sama sekali"¹². Tanggapan yang lain lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : 21
Tanggapan Responden Dirugikan Oleh Si Penerima Gadai

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Dirugikan	10	100 %
2	Biasa saja	-	-
3	Tidak dirugikan	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber data: Data Olahan

¹² Isam, (Rahin), *wawancara*, Bangun Setia, Minggu 24 April 2011.

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 10 pegadai (100 %) yang menyatakan dirugikan oleh si penerima gadai.

Untuk mengatasi kesulitan dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat melakukan pegadian sesama masyarakat disebabkan minimnya pengetahuan tentang Perum pegadian, padahal perum pegadian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota kecil. Namun bagi masyarakat Bangun Setia yang mengetahui adanya perum pegadaiaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 22
Tanggapan Responden mengetahui adanya perum pegadaian

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Mengetahui	1	10 %
2	Ragu-Ragu	-	-
3	Tidak Mengetahui	9	90 %
Jumlah		10	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 1 pegadai (10 %) yang menyatakan mengetahui adanya perum pegadaian dan 9 pegadai (90 %) yang menyatakan tidak mengetahui adanya perum pegadaian.

Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga, meminjam uang kepada perum pegadian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau

tukang penerima gadai yang bukan perum pegadaian. Begitu juga dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan. Hasil dari survei di lapangan para pegadai di Bangun Setia Jorong Kuamang mereka yang mengetahui tentang tujuan pegadaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 23
Tanggapan Responden mengetahui Tujuan/Fungsi Perum pegadaian

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Mengetahui	1	10 %
2	Ragu-Ragu	-	-
3	Tidak Mengetahui	90	90 %
Jumlah		10	100%

Sumber data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 1 pegadai (10 %) yang menyatakan mengetahui tujuan/fungsi perum pegadaian dan 9 pegadai (90 %) yang menyatakan tidak mengetahui tujuan/fungsi perum pegadaian.

Disamping pengetahuan masyarakat minim tentang pegadaian, kendalanya seperti kata Afriyon: tidak mempunyai sertifikat tanah kebun karet, dan dengan menggadaikan sesama masyarakat dana nya cepat diperoleh dan tidak membutuhkan banyak syarat-syarat serta tidak tahu adanya perum pegadaian. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : 24
Tanggapan Responden Yang Menggadaikan Kebun Karet
Kepada Masyarakat Yang Kelebihan Dana Bukan ke Perum Pegadaian

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Biar dana cepat diperoleh	4	40 %
2	Perum pegadaian lama prosesnya	-	-
3	Karena tidak tahu adanya perum pegadaian	6	60 %
Jumlah		10	100%

Sumber data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 4 pegadai (40 %) yang menyatakan biar dana cepat diperoleh dan 6 pegadai (60 %) yang menyatakan karena tidak tahu adanya perum pegadaian.

Dengan ekonomi yang pas-pasan diwaktu butuh dana cepat dan tidak adanya pengetahuan tentang perum pegadian maka kepada sesama masyarakat yang kelebihan dana lah digadaikan kebun karet, setelah digadaikan sangat mempengaruhi terhadap ekonomi kami bahkan kadang-kadang kerja sama orang berupa sebagai kuli disawah dan di kebun karet orang lain, kalau kerja dikebun karet orang hasilnya dibagi dua sama pemilik kebun karet itu pun cuma mencukupi kebutuhan sehari-hari, juga pergi merantau terlebih dahulu kekampung orang lain untuk mencari pekerjaan sehingga dapat melunasi hutang sama si penerima gadai¹³.

B. Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Pegadaian Kebun Karet

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah

¹³ Isam, (Rahin), *wawancara*, Bangun Setia, Sabtu, 23 April 2011.

terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah demikian mau tidak mau mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting, terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Menjual barang berharga namun, resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Untuk mengatasi kesulitan di atas di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut, disebut usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin.

Kegiatan pegadaian pada umumnya mempunyai dampak positif dan negatif yang harus disikapi, Berdasarkan wawancara dengan bapak Helmi beliau mengatakan bahwa dampak positif dengan adanya pegadaian sesama warga sebagai berikut¹⁴ :

1. Prosesnya yang cepat
2. Persyaratannya mudah
3. Tidak ada limit waktu yang mengakibatkan kalau telah jatuh tempo bertambahnya hutang.

¹⁴ Helmy, (Rahin), *wawancara*, Bangun Setia, Minggu 24 April 2011.

Berdasarkan wawancara yang penulis dapatkan, resiko barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Untuk mengatasi kesulitan di atas agar kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang yang dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut, dinamakan dengan usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin.

Beliau mengatakan bahwa dampak negatif adanya pegadaian sesama warga sebagai berikut¹⁵ :

1. Menghilangkan matapencaharian si pegadai
2. Menguntungkan sebelah pihak (penerima gadai)
3. Kurangnya perawatan terhadap jaminan gadai kebun karet tersebut

Meskipun demikian, masyarakat Bangun Setia Jorong Kuamang masih dan tetap melakukan pegadaian di karenakan keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan harian.

Untuk lebih jelasnya tanggapan para pegadai setelah megadaikan kebun karet apakah mempengaruhi terhadap ekonomi keluarganya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

¹⁵ Wahir (Rahin), *wawancara* , Bangun Setia, Jum'at , 29 April 2011

Tabel : 25
Tanggapan Responden Setelah Megadaikan Kebun Karet
Mempengaruhi Terhadap Ekonomi Keluarganya

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Mempengaruhi	10	100 %
2	Tidak mempengaruhi	-	-
3	Biasa saja	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 10 pegadai (100 %) yang menyatakan setelah menggadaikan kebun karet mempengaruhi terhadap ekonomi keluarganya.

Dengan situasi dan kondisi sedemikian seperti yang dikatakan oleh beberapa pegadai: seharusnya para penerima gadai tidak lagi menerapkan sistem seperti ini dan marilah kita menanamkan tolong menolong sehingga tidak merugikan satu sama lain, serta harapan kami kepada pemerintah perhatikan lah keadaan masyarakat yang dibawah dan kalau bisa dirikan lah berupa suatu lembaga pegadaiaan yang bisa memperhatikan masyarakat artinya ketika masyarakat membutuhkan biaya cepat bisa terpenuhi dengan pinjaman yang tidak lagi ke para penerima gadai yang semata-mata mencari keuntungan dan memanfaatkan hasil barang jaminan.¹⁶

Bila ditinjau dari hukum Islam para penerima gadai di Bangun Setia waktu penulis dilapangan bertanya kepada mereka, mereka mengatakan; ada yang mengetahui, samar-samar dan tidak mengetahui sama sekali. Adapun

¹⁶ M. Basmi, (Rahin), *wawancara*, Bangun Setia, Kamis, 28 April 2011.

yang mengetahui tentang hukum atau syarat pengambilan hasil dari barang jaminan berbagai pendapat. seperti ditabel di bawah ini :

Tabel : 26
Tanggapan Responden Mengetahui Hukum/Syarat Pegambilan
Manfaat atau Hasil Barang Jaminan

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Tahu	2	25 %
2	Samar-samar	4	50 %
3	Tidak tahu	2	25 %
Jumlah		8	100%

Sumber data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 2 penerima gadai (25 %) yang menyatakan mengetahui hukum atau syarat pengambilan hasil barang jaminan, 4 penerima gadai (50 %) yang menyatakan samar-samar dan 2 penerima gadai (25 %) yang menyatakan tidak mengetahui hukum atau syarat pengambilan hasil barang jaminan.

Implementasi pegadaian di Bangun Setia yang mengambil hasil jaminan kebun karet bila di tinjau dengan Syariat Islam para penerima gadai yang penulis jadikan sebagai sampel, mengatakan samar-samar seperti kata Ibu Gadi: Samar-Samar karena katanya, saya tidak tahu apakah dibolehkan atau tidak,¹⁷ dan bapak Batir: mengatakan tidak sesuai, karena merugikan pegadai.¹⁸ tanggapan tentang pelaksanaan pegadaian di Bangun Setia telah sesuai dengan Syari'at Islam dapat dilihat pada tabel dibawah :

¹⁷ Gadi, (Murtahin), *wawancara*, Bangun Setia, Minggu, 24 April 2011.

¹⁸ Batir, (Murtahin), *wawancara*, Bangun Setia, Senin, 2 Mei 2011.

Tabel : 27
Tanggapan Responden Sesuai Pelaksanaan Pegadaian Yang di Terapkan
Oleh Para Penerima Gadai di Bangun Setia Dengan Syari'at Islam

NO	Jawaban	Angka	Persen
1	Sudah	-	-
2	Samar-samar	2	25 %
3	Tidak sesuai	6	75 %
Jumlah		8	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 2 penerima gadai (25 %) yang menyatakan samar-samar dengan syari'at Islam, dan 6 penerima gadai (75 %) yang menyatakan tidak sesuai.

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengambilan Hasil Barang Jaminan Kebun Karet

Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitanya sebagai makhluk dengan tuhan-Nya maupun dalam kaitannya sebagai makhluk, dalam *fiqh* atau *ushul al-fiqh* disebut dengan *Syari'ah*. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, *Syari'ah* ini terbagi kepada dua, yakni : *Ibadah* dan *Muamalah*. *Ibadah* adalah *Syari'ah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan-Nya, sedangkan *muamalah* adalah *Syari'ah* yang mengatur hubungan antar sesama manusia.

Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antara sesama manusia, ia bukan merupakan bagian dari *aqidah*,

akhlak, dan *ibadah*, melainkan bagian integral dari *muamalah*. Namun demikian, masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek *aqidah*, *akhlak*, maupun *ibadah*, sebab menurut perspektif Islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai *aqidah*, *akhlak*, dan *ibadah*¹⁹. Istilah ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani Kuno (*Greek*) berarti ‘mengatur urusan rumah tangga’. Menurut istilah pakar ekonomi, ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non-material untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁰

Dalam perkembangan dewasa ini, ada dua sistem ekonomi yang paling berpengaruh didunia, yaitu : sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi yang mengizinkan dimilikinya alat-alat produksi oleh pihak swasta, sedangkan sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis yakni suatu sistem ekonomi dimana pemerintah atau *gilde-gilde* pekerja memiliki serta menjalankan semua alat produksi; sehingga dengan demikian, usaha swasta dibatasi dan mungkin kadang-kadang dihapuskan sama sekali.

¹⁹ A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. 1, Cet. ke-1, h. 17-18.

²⁰ Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), Cet. ke-1, h. 47.

Berhubung sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya, asumsi dasar atau norma pokok aturan main dalam proses maupun integrasi kegiatan ekonomi yang menjadi asumsi dasarnya adalah syari'at *Islam*, Syari'at Islam diberlakukan secara menyeluruh (*kaffah* atau *totalitas*) baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, maupun pengusaha atau pemerintah²¹. Implementasi dari pemahaman Islam akan membentuk kehidupan Islami dalam masyarakat yang secara langsung akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, praktek sistem ekonomi Islam tidak identik dengan sistem kenegaraan di beberapa negara Timur Tengah yang menggunakan Islam sebagai dasar negaranya. Sistem ekonomi lebih berkaitan dengan bangunan masyarakat yang perilakunya berdasarkan atas sumber Islam al-Qur'an dan al-Hadits dimana sistem ekonomi Islam bisa dipraktekkan dimasyarakat manapun juga.²²

Pegadaian adalah salah satu bagian dari bidang ekonomi yang memberikan pendanaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat kecil atau yang lagi membutuhkan dana. Seperti pendirian gadai syariah yang dilatar belakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya lembaga pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan pegadian

²¹ Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2008), Cet. ke-1, h. 21.

²² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004), Cet. ke-3, h. 105.

Syariah dimaksud untuk melayani pasar dan masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil), menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman, sehingga masyarakat bisa terbantu dan melakukan pegadaian sesuai dengan syariat dan saling meridhoi.

Lain halnya dengan pegadaian yang terdapat di Bangun Setia Jorong Kuamang Nagari Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur Sumatera Barat, masyarakat sering melakukan pegadaiaian untuk memenuhi kebutuhan dana cepat dikarenakan berbagai hal seperti, biaya perawatan dikala ada keluarga yang sakit, biaya pendidikan, dan untuk yang lainnya, pegadaian ini tidak dengan perum pegadian resmi akan tetapi pegadian antar warga dengan barang jaminan kebun karet.

Hasil dari observasi penulis di lapangan terhadap pegadaian yang diimplementasikan para pegadaian di Bangun Setia yang mereka buat selaku penerima gadai dengan cara barang jaminan kebun karet mereka kuasai sepenuhnya, artinya hasil dari jaminan kebun karet mereka ambil layaknya milik sendiri atau sudah dijual selama hutang si pegadai belum lunas. dalam pembayaran piutang si pegadai membayar tetap sebanyak piutangnya tanpa ada pengurangan sedikitpun, sementara hasil kebun karet yang mereka jamin diambil oleh penerima gadai sepenuhnya, padahal kalau dihitung-hitung hasilnya melebihi dari hutang si pegadai karena tidak ada batas waktu. Dalam pegadaian harus ditentukan waktunya sehingga tidak saling merugikan dan sama-sama ridho.

Dalam pengambilan manfaat atau hasil barang yang digadaikan, dalam pandangan Ekonomi Islam atau pendapat para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).²³ Dasar hukumnya hadis Nabi Muhammad saw:

Dari Muhammad ibnu Ismail ibnu Abu Fudaik telah menceritakan kepada kami, dari ibnu Abu Dzi-b, dari ibnu Syihab, dari Sa'id ibnu Musayyab, bahwa Rasulullah SAW, Pernah bersabda:

لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

Artinya:

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya”. (H.R. Asy-Syafi'i)²⁴.

Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai

²³ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1997), Ed. ke-3, h. 333.

²⁴ Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), Juz 2, Cet. ke-1, h. 1343.

(*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut :

- a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal itu diperbolehkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah di syaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.²⁵

Sedangkan pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah

- a. Ada izin dari si pemilik barang, dan
- b. Adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Kebolehan *murtahin* memanfaatkan harta benda gadai atas seizin pihak *rahin*, dan nilai manfaatnya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk *marhun*. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Hal ini berdasarkan hadis nabi sebagai berikut.

²⁵ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konsstruksi Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), Ed. ke-1, h. 70.

هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب

مرهونا. ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا, الذي يركب ويشرب ته.

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, "Rasulullah saw. Bersabda, "Punggung hewan boleh ditunggangi jika digadaikan, dan susu binatang boleh diminum jika digadaikan, namun orang yang menunggang dan orang yang meminum wajib mengeluarkan biaya untuk kebutuhan hewan atau binatang tersebut". (HR. At-Tirmidzi)²⁶.

Dan menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harta atau tidak.

Alasannya hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut.

هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن

يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا,

الذي يركب ويشرب النفقة.

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, "Rasulullah saw. Bersabda, "Binatang ternak yang digadaikan, saat digadaikan boleh dinaiki oleh pemberi hutang, sesuai biaya yang dikeluarkan untuk mengurusnya. Dan ketika digadaikan, susunya juga boleh diambil oleh pemberi hutang, karena dengan biayanya pengurusan binatang tersebut. Orang yang menunggangi dan meminum susunya, harus membiayai pengurusannya". (HR. Al-Bukhari)²⁷.

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dari fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh si penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut,

²⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid. 2, Cet. ke-1, h. 39.

²⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Jilid. 2, Cet. ke-1, h. 183.

padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*)²⁸. Menurut Imam Ahmad dan Ishaq, apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang di berikan kepadanya²⁹. Pegangan mereka adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. r.a. dari Nabi. Saw.:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرهن محلو ومر كوب (اخرجہ ابن ماجہ)

Artinya:

"Sesungguhnya Nabi. Saw. Bersabda: barang gadai itu diambil susunya dan ditunggangi atau dinaiki ." (H.R. Ibnu Majah)³⁰.

Pemanfaatan barang oleh *murtahin* tersebut Jika akad *ar-rahn* itu untuk utang dalam bentuk *al-qardh*, yaitu utang yang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama, bukan nilainya. Misalnya, pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah, atau beras 1 ton (dengan jenis tertentu), atau kain 3 meter (dengan jenis tertentu).

Pengembaliannya harus sama, yaitu 50 juta rupiah, atau 1 ton beras dan 3 meter kain dengan jenis yang sama. Dalam kasus utang jenis *qardh* ini, *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan sedikitpun,

²⁸ Muhammad,. Sholikhul Hadi, *op. cit.*, h. 76.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid-3, Cet. ke-3, h. 203.

³⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid. 2, Cet. ke-1, h. 419.

karena itu merupakan tambahan manfaat atas *qardh*. Tambahan itu termasuk riba dan hukumnya haram.

Dan begitu juga pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba. Rasulullah saw. Bersabda:

وعن علي رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
منفعة فهو ربا. ()

Artinya:

“Dari Ali ra, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (Riwayat Harits bin Usamah)³¹.

Dari beberapa pendapat ulama yang di ungkapkan diatas, mempunyai hukum dasar yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mempunyai pendapat, tetap menjadikan dasar pada hadis yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu fungsi barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, harus ada izin dari (*rahin*), berkaitan dengan pengambilan manfaat atau hasil dari barang jaminan kebun karet yang

³¹ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid-4, Cet. ke-1, h. 495.

digadaikan oleh para pegadai di Bangun Setia Jorong Kuamang boleh diambil supaya tidak mubazir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan pegadai, atas kesepakatan bersama. Ada satu hal yang amat penting diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya pegadai dan penerima gadai. Dalam masalah ini tidak terlepas dari prinsip tolong-menolong dan saling pengertian antara pegadai dengan penerima gadai. Namun, perjanjian yang dibuat oleh si pegadai dan penerima gadai di Bangun Setia jorong Kuamang tidak adanya limit waktu, dalam pengambilan manfaat atau hasil dari jaminan kebun karet tidak pernah ada konfirmasi seberapa pendapatan terhadap si pegadai dan bahkan dalam pengambilan pemanfaatan atau hasil kebun karet tidak sesuai dengan seharusnya seperti dikala hari hujan masih mereka manfaatkan padahal itu sangat berdampak negatif (tidak produktif) terhadap kebun tersebut dan kurangnya perawatan dari si penerima gadai, dengan demikian merugikan sepihak.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut dalam adat istiadat atau kebiasaan bahwa pemegang barang jaminan gadai berhak mengambil hasil kebun karet yang sedang menjadi tanggungan utang, dan semua hasilnya menjadi hak pemegang barang gadai sendiri, menurut ketentuan Ekonomi Islam tidak dapat dibenarkan, dan tidak boleh sebab berakibat kerugian pada pihak orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), yang sebagai pemilik tidak ikut menikmati hasil miliknya sendiri yang dikerjakan orang lain pengambilan manfaat barang gadai yang mengeluarkan hasil oleh

pemegang barang gadai serupa itu dapat dipandang mengandung unsur-unsur semacam eksploitasi oleh pihak kuat terhadap pihak lemah, oleh pihak kaya terhadap pihak miskin. Karena pada dasarnya yang berhak memungut hasil atau manfaat barang gadai adalah orang yang menyerahkan barang gadai dalam kedudukan sebagai pemilik, maka ia juga lah yang memikul biaya pemeliharaannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Pegadaian Kebun Karet di Bangun Setia Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur Sumatera Barat Menurut Ekonomi Islam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pegadaian di Bangun Setia Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Timur Sumatera Barat yang dominan di jadikan sebagai agunan jaminan adalah kebun karet. Jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan atau di ambil hasilnya oleh si penerima gadai selama hutang pegadai belum dilunasi dengan jangka waktu yang tidak dibatasi.
2. Akibat yang ditimbulkan oleh pegadaian kebun karet itu dengan sesama warga bukan ke perum pegadaian bila ditinjau di segi positifnya antara lain: prosesnya yang cepat, persyaratannya mudah, dan tidak ada limit waktu atau pakai jatuh tempo yang mengakibatkan bertambahnya hutang atau didenda. Sedangkan di segi negatif atau resikonya adalah: menghilangkan matapencarian si pegadai, kurangnya perawatan terhadap jaminan gadai kebun karet tersebut sehingga membuat karet tidak lagi produktif, dan menguntungkan sebelah pihak (penerima gadai).
3. Menurut Ekonomi Islam pengambilan hasil atau manfaat barang jaminan kebun Karet sebahagian ulama membolehkan, sesuai dari fungsi barang

gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, harus ada izin dari (*rahin*), disyaratkan ketika akad, dan ditentukan waktunya apabila tidak ditentukan maka menjadi batal.

adapun jumhur *fuqaha* berpendapat penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Namun, perjanjian yang dibuat oleh si pegadai dan penerima gadai di Bangun Setia Jorong Kuamang dalam pengambilan manfaat atau hasil dari jaminan kebun karet tersebut tidak ada limit waktu, dan dari hasil penelitian penulis dilapangan jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai bermacam-macam, ada yang 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan bahkan ada yang lebih 24 bulan, kalau dihitung-hitung melebihi dari hutangnya padahal kebun tersebut tidak mengeluarkan biaya perawatan. dan bahkan dalam pengambilan pemanfaatan atau hasil kebun karet tidak sesuai dengan seharusnya seperti dikala hari hujan masih mereka memanfaatkan padahal itu sangat berdampak negatif (tidak produktif) terhadap kebun tersebut dan kurangnya perawatan dari si penerima gadai, dengan demikian merugikan sepihak dalam hal ini pandangan ekonomi Islam tidak boleh.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas dan wawancara penulis dengan responden dilapangan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para pegadai seiring dengan berkembangnya Lembaga Keuangan untuk lebih selektif memilih lembaga-lembaga keungan sehingga tidak dirugikan dan melakukan pegadaian saling ridho.
2. Bagi pegadai dan penerima gadai dalam akad ditentukan waktunya. Sehingga tidak ada yang dirugikan.
3. Sebaiknya bagi penerima gadai hasil yang diperoleh itu diperhitungkan dan dikeluarkan seberapa bagian untuk si pegadai dan untuk penerima gadai sehingga tidak lagi merugikan sepihak dan bahkan si pegadai dengan adanya sistim seperti demikian bisa lebih terbantu dan bisa mencicil piutangnya.
4. Bagi lembaga pegadaian seharusnya mensosialisikan kepada seluruh masyarakat termasuk di daerah yang terisolir, agar masyarakat mengetahui dan menghindari praktek gadai yang tengah dilakukan dan jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Prof., Yadi, Janwari, M.Ag. Drs. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. 1, Cet. ke-1.
- A. Jafri, Syafii, Drs. *Fiqh Muamalah*, (Penerbit: Pekanbaru Suska Press, 2008), Cet. ke-1.
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid-4, Cet. ke-1.
- Abid, Muhammad, As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), Juz 2, Cet. ke-1.
- Abu Bakar Taqiyuddin Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shalih*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), Cet. ke-7.
- Bambang, R Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Penerbit: Paramadhina Press, 2003), Cet. ke-1.
- Choirotunnisa, *Bisnis Halal Bisnis Haram*, (Jombang; Lintas Media, 2007), Cet. ke-1.
- Dahlan. Y. al-Barry dan Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah: Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003) Cet. ke-1.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya-Edisi Tajwid*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), Cet. ke-1.
- Ghofur, Abdul, Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), Cet. ke-1.
- Idri, M.Ag., Triwulan, Titik, Tutik, S.H., M.H. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Dalam Terbitan (KDT), 2008), Cet. ke-1.
- Kasmir, SE., MM. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-6.
- Kashiko Tim, *Kamus al--Munir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2000), Cet. ke-1.
- Madjid, Ahmad Abd, *Masa'il Fiqhiyah*, (Jawa Tengah: Garoeda Buana Indah, 1993), Cet. ke-4.

- Mawardi, M.Ag. *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. ke-1.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Jilid. 2, Cet. ke-1.
- _____, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Jilid. 2, Cet. ke-1.
- _____, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid. 2, Cet. ke-1.
- _____, *Shahih At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid. 2, Cet. ke-1.
- Huda, Nurul. dan Mohammad Heykal , *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana 2010), Ed. 1, Cet. Ke-1.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. ke-27.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid. 3, Cet. ke-3.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Qawaid: Daar al-Bayan, 1971), Juz 12, Cet. ke-1.
- Sanadi, Abi Hasan, *Shahih Bukhari*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), Jilid. 2, Cet. ke-1.
- Sholikhul, Muhammad, Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konsstruksi Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).
- Soemitra, Andri, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. ke-2.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004), Cet. ke-3.
- Suhendi, Hendi, M.Si. Dr. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), Ed. 1, Cet. ke-2.
- Syarifuddin, Amir, Dr. Prof. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur :Kencana, 2003), Ed. 1, Cet. ke-1.
- Syafi'i, Muhammad, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. ke-1.

Syafei, Rachmat, M.A. DR. Prof. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. ke-1.

T. Chuzaimah, Yanggo,. Hafiz, Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1997), Cet. ke-1.

Taqiyuddin, al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).Cet. ke-1.

Wirdyaningsih, et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), Cet. ke-2.

Zainuddin, Ali, M.A. DR. Prof. *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-1.

Zuhdi, Masjfuk, Drs. Prof. H. *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), Cet. ke-10.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet. ke-3.